

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu proses untuk memperbaiki kualitas hidup suatu bangsa secara ekonomis (Sugiharto, 2008). Pembangunan pada umumnya difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, pembangunan dimaknai sebagai proses tumbuhnya pembangunan infrastruktur fisik dan pembangunan manusia. Dalam pelaksanaannya pembangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan derajat perkembangan manusia (indikator dari derajat perkembangan manusia adalah peningkatan pendidikan, kesehatan dan standar kehidupan). Dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan derajat perkembangan manusia, masalah masalah seperti pengangguran, kemiskinan, kriminalitas dan ketimpangan pendapatan dapat diatasi.

Suatu wilayah bukan hanya merupakan sistem yang berbeda antara satu dan lainnya tetapi juga merupakan jaringan sosial ekonomi maupun interaksi fiskal. Dimana sistem ini dibentuk oleh adanya pergerakan timbal balik yang merupakan hasil dari kontak masyarakat pada suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Usaha pembangunan harus diarahkan kembali pada pembangunan keruangan yang terintegrasi. Tujuannya adalah memajukan sistem pusat-pusat pelayanan yang meningkatkan berbagai aktifitas masyarakat dibidang sosial ekonomi. Dengan demikian diharapkan mampu memenuhi segala kebutuhan pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduk.

Perkembangan ekonomi wilayah merupakan bagian dan kelanjutan dari pembangunan itu sendiri, namun yang terjadi dalam era Pelita I hingga tahun 1997, pembangunan di wilayah Indonesia secara makro terlihat sukses. Dan jika hal ini lebih dikerucutkan, maka akan terlihat kesenjangan dalam bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok serta kesenjangan ekonomi antar propinsi. Hal ini yang kemudian mendorong adanya desentralisasi pembangunan, yang diwujudkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang selanjutnya diperbaharui melalui UU No. 32 Tahun 2004. Salah satu perwujudan dari desentralisasi tersebut adalah pemekaran wilayah kepulauan Nias, dimana Nias Selatan yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Nias, melalui UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 25 Februari 2003 memperoleh hak otonom, yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 Juli 2003.

Kabupaten Nias Selatan terkenal sebagai kabupaten yang subur dan sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut yang berpotensi bidang perikanan laut dan pariwisata laut yang terkenal seperti Sorake dan Lompat Batu di Bawomataluo dan juga ada pada dataran rendah dan dataran bergelombang, dan adanya pelabuhan laut, oleh karena itu Kabupaten Nias Selatan merupakan wilayah yang cukup strategis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan, terdapat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang secara tidak langsung dikemukakan bahwa Kabupaten Nias Selatan ingin mengembangkan wilayahnya dengan memajukan potensi perdagangan dan menjadikan kecamatan-kecamatan menjadi kawasan perkotaan.

Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan memiliki hierarki, yakni: Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Teluk Dalam, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang terletak di Pasar Pulau Tello, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terletak di Orahili Gomo, Lolowau dan Hilisimaetano, serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang terletak di Hilisataro, Hilizalootano, Bawomataluo, Lawindra, Sifalago Susua, Tetegawai, Bawootalua, Tuindrao, Hiliorudua, Hiliotalua, Togizita, Labuhan Hiu dan Eho (berdasarkan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011-2031). Sektor ekonomi kabupaten ini terutama didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Keempat sektor ini tersebar dalam empat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), Satuan Wilayah Pengembangan I yang terdiri dari kecamatan Teluk Dalam, kecamatan Maniamolo, kecamatan Fanayama, kecamatan Amandraya, kecamatan Aramo, kecamatan Mazino dan kecamatan Toma dengan potensi pertanian. Satuan Wilayah Pengembangan Kecamatan II terdiri dari kecamatan Hibala, kecamatan Pulau-pulau Batu dan kecamatan Pulau-pulau Batu Timur dengan potensi perikanan. Satuan Wilayah Pengembangan III terdiri dari kecamatan Gomo, kecamatan Lahusa, kecamatan Umbunasi, kecamatan Susua, kecamatan Mazo dengan potensi perkebunan nilam, kakao dan peternakan. Satuan Wilayah Pengembangan IV terdiri dari kecamatan Lolowau, kecamatan Lolomatua dan kecamatan Hilimegai dengan potensi perkebunan karet, kopra dan cengkeh dan peternakan. Selain empat sektor tersebut, kabupaten Nias Selatan memiliki potensi sektor pariwisata. Potensi sektor pariwisata kabupaten Nias Selatan terletak pada jalur yang disebut Segitiga Emas Industri Pariwisata Nias Selatan,

yakni Kecamatan Lolowa'u-Kecamatan Gomo-Kecamatan Pulau-pulau Batu dengan porosnya adalah *Omo Hada*, yang merupakan rumah tradisional di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama dengan tradisi *hombo batu* atau yang lebih dikenal dengan lompat batu dan Pantai Sorake sebagai kawasan surfing tingkat internasional. Di Kecamatan Pulau-pulau Batu terdapat lokasi menyelam, terumbu karang, serta ikan ikan hias dan pantai berpasir putih. Adapun peninggalan zaman megalitik berupa batu-batu megalit terdapat di Kecamatan Lahusa, Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Gomo.

Antara Satuan Wilayah Pengembangan I dengan Satuan Wilayah Pengembangan II, Satuan Wilayah Pengembangan III dan Satuan Wilayah Pengembangan IV terdapat ketimpangan, dimana kegiatan perekonomian di Satuan Wilayah Pengembangan I lebih unggul dibandingkan dengan Satuan Wilayah Pengembangan yang lain. Faktor yang mempengaruhi keunggulan tersebut diduga dengan keberadaan Pantai Sorake sebagai lokasi surfing internasional didalam Satuan Wilayah Pengembangan I, yang mempengaruhi jumlah kedatangan wisatawan yang berhubungan dengan devisa, serta investasi pembangunan fisik dan non fisik.

Pada dasarnya otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan atau keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kenyataan yang ditemukan di lapangan, beberapa daerah otonomi mengalami

ketersendatan dalam proses pembangunan atau dengan kata lain perekonomian wilayah tersebut berjalan ditempat, bahkan beberapa daerah kabupaten/kota pemekaran termasuk dalam kategori daerah tertinggal (*Enam kabupaten di Sumatera Utara yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Pakpak Bharat dan Tapanuli Tengah masuk dalam kriteria daerah tertinggal*; Pernyataan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini; Harian Analisa Medan, 27 Januari 2012). Analisa lain yang mendukung akan pernyataan mengenai keterlambatan perkembangan perekonomian wilayah kabupaten Nias Selatan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Nias Selatan pada tahun 2010 adalah sebesar 4,12%. Dan ini merupakan terendah di wilayah Kepulauan Nias jika dibandingkan dengan Kabupaten Nias (6,75%), Nias Utara (6,73%), Nias Barat (6,28%), Kota Gunung Sitoli (6,73%).

Dengan melihat masalah tersebut, maka perlu diadakan suatu analisa perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Nias Selatan dan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan untuk menemukan akar masalah perkembangan wilayah serta menilai potensi sumber daya alam yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat menentukan prospek perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah yang dapat diidentifikasi dari uraian diatas adalah keterlambatan perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Nias Selatan dan pengembangan potensi sumber daya alam wilayah yang tidak optimal, yang disebabkan pengelolaan sumber daya di wilayah kabupaten Nias Selatan dijual langsung

dalam bentuk alami tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga sumber daya tersebut bernilai rendah. Sedangkan potensi pariwisata belum diolah secara maksimal oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis perkembangan ekonomi wilayah kabupaten Nias Selatan dan kelanjutannya pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya perkembangan ekonomi wilayah ini.

### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Nias Selatan dan pengelolaan sumber daya wilayah yang dimiliki?
2. Bagaimana perkembangan dan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Nias Selatan

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Nias Selatan dan potensi ekonomi sumber daya wilayah yang dimiliki
2. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Nias Selatan

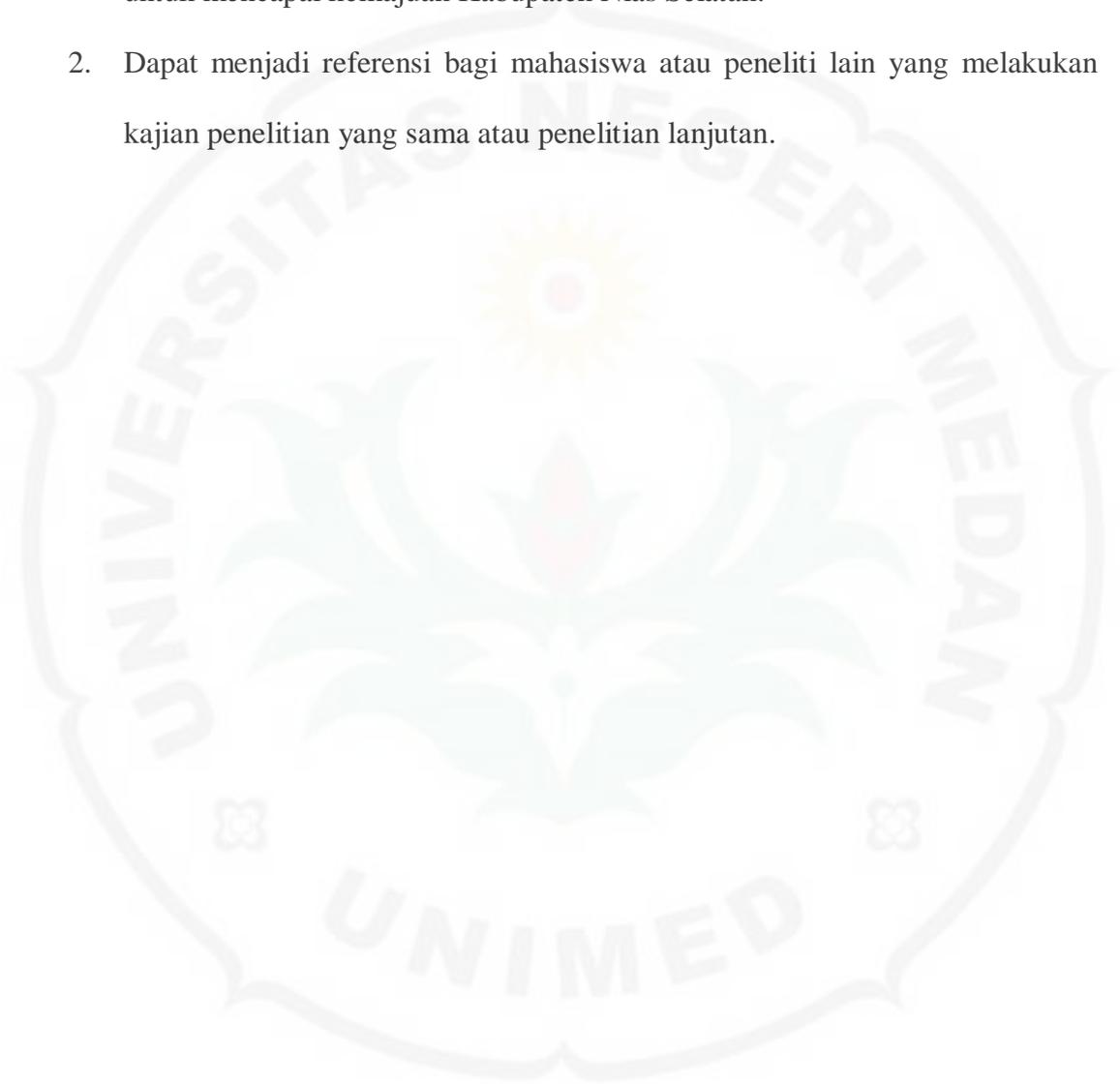
### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dengan ditemukannya faktor-faktor yang mempengaruhi laju tingkat perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat

diharapkan sebagai bahan acuan untuk mengatasi permasalahan yang ada untuk mencapai kemajuan Kabupaten Nias Selatan.

2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang melakukan kajian penelitian yang sama atau penelitian lanjutan.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY